

# Implementasi Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 49 Pekanbaru

Ilya Ade Salmi<sup>1</sup> Lilis Suriani<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau  
Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
e-mail : Ilyaadesalmi@student.uir.ac.id

## Abstract

*This study analyzes the implementation of the Graduate Competency Standards (SKL) development program at SMP Negeri 49 Pekanbaru. The background is the importance of SKL as the minimum achievement criteria that educational institutions must meet to ensure the quality of graduates. The literature review draws on Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which explains policy success through the variables of Content of Policy and Context of Implementation. The research employed a descriptive qualitative method, with data collected through observation, in-depth interviews with key informants, and a documentation study. The findings indicate that the implementation of the SKL development program at SMPN 49 Pekanbaru is in accordance with Ministerial Regulation of Primary and Secondary Education Number 10 of 2025; however, it has not been optimal and tends to function merely as an administrative formality. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, inadequate human resource competence, and high teacher workload. In conclusion, although the program is formally implemented, strengthening technical and substantive aspects is necessary so that SKL development produces a real and sustainable impact on students' competencies rather than merely fulfilling administrative requirements.*

**Key Words:** Policy Implementartion, Graduate Competency Standards, Junior Secondary Education

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru. Latar belakangnya didasarkan pada pentingnya SKL sebagai kriteria minimal capaian peserta didik yang harus dipenuhi satuan pendidikan untuk menjamin mutu lulusan. Kajian pustaka menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang memandang keberhasilan kebijakan melalui variabel Content of Policy (isi kebijakan) dan Context of Implementation (konteks pelaksanaan). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan studi dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program pengembangan SKL di SMPN 49 Pekanbaru sudah sesuai Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025, tetapi belum optimal dan cenderung sekadar formalitas administratif. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta beban kerja guru yang tinggi. Kesimpulannya, meskipun program berjalan secara formal, perlu penguatan aspek teknis dan substansi agar pengembangan SKL berdampak nyata dalam meningkatkan kompetensi siswa secara berkelanjutan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Standar Kompetensi Lulusan, Pendidikan Menengah Pertama

## Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran sentral dalam membentuk individu yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga mampu berkembang untuk berkontribusi secara aktif dalam masyarakat. Melalui pembelajaran berkelanjutan, siswa memperoleh wawasan ilmiah, mengasah keterampilan, dan menanamkan nilai-nilai utama seperti kejujuran, moralitas, serta keterampilan sosial yang sangat penting untuk kolaborasi sosial dan lingkungan profesional. Komitmen negara dalam meningkatkan mutu pendidikan tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu tujuan utama bangsa.

Untuk memenuhi amanat tersebut, pemerintah telah menetapkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan di berbagai jenjang. Salah satu komponen utama SNP adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan melalui definisi yang jelas mengenai kompetensi dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Selain itu, SKL juga menjadi acuan dalam penentuan strategi pembelajaran, bentuk partisipasi siswa selama proses pembelajaran, serta metode penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar di institusi pendidikan.

Pemerintah telah menegaskan kembali komitmennya terhadap delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP), dengan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai komponen utama. SKL menggambarkan kompetensi minimal pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dicapai peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Bersama-sama, SNP dan SKL memberikan kerangka kerja untuk merancang proses pembelajaran, kegiatan kelas, dan metode evaluasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Nasional, 2003) mengatur SKL dan menekankan pada pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi individu yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (1, 2013) semakin mempertegas standar tersebut dan selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan 13 Tahun 2015 (1, 2013).

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 (Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016, 2016), Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 (Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan, 2025), dan Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2022 (Tahun, 2022) secara tegas menetapkan serta mengatur Standar Kompetensi Lulusan (SKL) secara rinci. Ketiga regulasi ini memastikan bahwa proses pembelajaran mendukung pencapaian SKL melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 menetapkan delapan dimensi kemampuan SKL jenjang SMP sebagai landasan utama, yaitu keimanan dan ketakwaan, kewargaan aktif, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berkomunikasi. Setiap dimensi saling berkaitan erat; kolaborasi memperkuat komunikasi, sedangkan penalaran kritis mendorong kreativitas. Seluruh dimensi ini menegaskan arah pendidikan dalam membentuk peserta didik yang berkarakter dan kompeten untuk menghadapi tantangan masa depan.

Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan (2025), standar kompetensi lulusan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dirumuskan ke dalam delapan dimensi utama yang menjadi acuan pengembangan capaian peserta didik. Delapan dimensi tersebut meliputi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan aktif, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian,

kesehatan jasmani dan rohani, serta kemampuan berkomunikasi. Seluruh dimensi ini dirancang secara terpadu untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul dalam aspek akademik, tetapi juga memiliki karakter, kepedulian sosial, kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta keterampilan hidup yang relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan SMP diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang seimbang antara penguatan nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Namun demikian, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Secara perencanaan, sekolah telah menetapkan dua belas program pengembangan SKL yang mencakup aspek akademik, penguatan karakter, pengembangan diri, serta pencegahan perilaku berisiko pada peserta didik. Berdasarkan hasil tinjauan awal, terdapat tiga program yang belum terlaksana secara optimal, yaitu program pengembangan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penguatan nilai-nilai kebangsaan dan integritas, serta program pencegahan narkoba, alkohol, rokok, dan HIV/AIDS. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan realisasi pelaksanaan program di sekolah. Lebih lanjut, belum optimalnya pelaksanaan beberapa program pengembangan SKL tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung yang belum memadai, tingginya beban kerja guru, serta koordinasi antar pihak pelaksana yang belum berjalan secara maksimal. Selain itu, mekanisme pelaporan program masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil serta tingkat keberhasilan implementasi program di lapangan.

Fenomena ini penting dikaji lebih dalam karena keberhasilan implementasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) menjadi indikator utama menilai kualitas lulusan dan efektivitas pendidikan. Ketidakefektifan beberapa program yang telah dirancang menunjukkan perlunya studi lebih mendalam tentang proses implementasi kebijakan, hambatan yang muncul, serta strategi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat pelaksanaan program di tingkat sekolah. Dalam studi ini, analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle (Imronah, 2020), yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor utama: isi kebijakan (*policy content*) dan konteks pelaksanaan (*implementation context*). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran lengkap tentang pelaksanaan program pengembangan SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru dan menawarkan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa depan.

### **Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini berfokus pada implementasi program pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru sebagai bagian dari praktik administrasi dan kebijakan publik di sektor pendidikan. Secara konseptual, administrasi publik dipahami sebagai proses pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik (Nugroho, 2024; Rosenbloom, 2014 dalam Administrasi, 2024; Chandler dan Plano, 1988 dalam Anirwan, 2025). Perspektif ini menegaskan bahwa program pengembangan SKL merupakan bentuk implementasi kebijakan pendidikan yang menuntut koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan publik (Hughes, 1994 dalam Anirwan, 2025). Namun, pandangan Ellwein et al. (Knill, 2001 dalam Anirwan, 2025) menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan

sering kali cenderung legalistik dan kurang fleksibel, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi program SKL di sekolah.

Dalam kerangka manajemen publik, keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi program (Ott, Hyde, dan Shafritz, 1990 dalam Andy Fefta Wijaya, 2014; Overman, 1984; Nor Ghofur, 2014 dalam Amane et al., 2023). Kajian ini relevan karena pengembangan SKL membutuhkan manajemen sekolah yang mampu mengelola berbagai program secara terpadu. Akan tetapi, penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum secara khusus mengkaji praktik manajemen publik dalam konteks pengembangan SKL di tingkat SMP.

Dari sudut pandang organisasi publik, organisasi dipahami sebagai sistem terkoordinasi yang bertujuan mencapai sasaran bersama melalui struktur, pembagian tugas, dan hubungan kewenangan (Robbins, 1996 dalam Sopiah, 2008; Winardi, 2013; Dwight Waldo dalam H. Aras Solong, n.d.). Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan program SKL sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi, pola koordinasi, serta pembagian peran di sekolah. Namun, kajian organisasi tersebut belum secara spesifik mengaitkan karakteristik organisasi sekolah dengan implementasi kebijakan pengembangan lulusan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan dipahami sebagai rangkaian tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui strategi dan penyediaan sumber daya (Laswell dan Kaplan; Friedrich; Anderson; Raksasataya dalam Yaw, 2008). Program pengembangan SKL merupakan bagian dari kebijakan publik pendidikan. Akan tetapi, sebagian besar kajian lebih menekankan pada perumusan kebijakan, bukan pada praktik pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan.

Sementara itu, teori implementasi kebijakan menekankan bahwa implementasi merupakan aktivitas untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Wibawa, 1994; Wahab, 2008; Winarno, 2008; Mufiz, 1999 dalam Yuliah, 2020). Mazmanian dan Sabatier (Li & Teori, 2010) serta Van Meter dan Van Horn (Meter, 2004; Imronah, 2020) menegaskan pentingnya peran aktor dan tindakan dalam mencapai tujuan kebijakan. Edwards III (1980 dalam Mulyadi, 2014; Posumah, 2023) mengidentifikasi empat faktor kunci implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang relevan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan program SKL. Grindle (1980 dalam Imronah, 2020) menambahkan bahwa implementasi baru efektif jika tujuan, program, dan pendanaan telah siap.

Berdasarkan kajian kritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu telah memberikan landasan teoretis yang kuat, namun masih terbatas pada kajian umum administrasi, manajemen, organisasi, dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi celah empiris dengan menganalisis secara spesifik bagaimana program pengembangan SKL diimplementasikan pada tingkat sekolah, khususnya di SMP Negeri 49 Pekanbaru.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta pengalaman para pelaksana kebijakan di SMP Negeri 49 Pekanbaru. Kerangka analisis yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980) yang menekankan dua aspek utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation*, karena implementasi kebijakan dipandang sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 49 Pekanbaru, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, yang dipilih secara purposive karena merupakan sekolah negeri yang relatif baru, masih dalam tahap pengembangan, serta menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program SKL, sehingga relevan untuk dianalisis berdasarkan perspektif Grindle (1980). Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program SKL (Heryana, 2018), dengan jumlah total 8 informan yang terdiri atas satu key informan, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, serta tujuh informan lainnya yang meliputi guru TIK, guru penanggung jawab penguatan nilai kebangsaan, guru penanggung jawab pencegahan NAPZA dan kesehatan reproduksi, staf tata usaha, dan siswa.

Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap para informan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), laporan kegiatan, Kurikulum Merdeka, dokumentasi sekolah, dan regulasi terkait, khususnya Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan yang menetapkan delapan dimensi lulusan sebagai dasar pengembangan SKL. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, karena teknik pengumpulan data merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan penelitian (Sugiyono dalam Suryani et al., 2020). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (Suryani et al., 2020). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, guna membandingkan serta menguji konsistensi data yang diperoleh dari berbagai informan, teknik pengumpulan, dan waktu pengambilan data (Sugiono, 2012 dalam Alfansyur & Mariyani, 2020).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Isi Kebijakan (*Content of Policy*)**

Menurut Merilee S. Grindle, variabel *content of policy* dalam implementasi kebijakan mencakup kepentingan yang terlibat, jenis manfaat yang dihasilkan, tingkat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, kompetensi pelaksana program, serta ketersediaan sumber daya pendukung agar kebijakan dapat berjalan secara efektif.

#### **1. Kepentingan Yang Dipengaruhi Kebijakan**

Sesuai dengan indikator *interest affected* dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, dan dikaitkan dengan rangkuman sebelumnya, hasil wawancara yang paling merepresentasikan kepentingan utama para pihak dalam implementasi pengembangan SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru menunjukkan bahwa siswa merupakan pihak yang paling langsung terdampak, sementara guru dan sekolah menjadi aktor pelaksana yang menanggung implikasi kebijakan dalam praktik.

Hal ini tercermin dari pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sebagai informan kunci yang menyatakan:

*"Jelas bahwa siswa paling terpengaruh karena mereka menjadi fokus utama dari kebijakan SKL ini. Guru juga pasti terdampak karena perlu menyesuaikan metode pengajaran dan penilaian. Secara keseluruhan, sekolah juga terpengaruh karena SKL ini menjadi ukuran keberhasilan kami."*

Temuan tersebut sejalan dengan rangkuman sebelumnya yang menegaskan bahwa kepentingan siswa, guru, dan sekolah telah selaras dengan tujuan kebijakan SKL, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pelaksanaannya. Keterbatasan tersebut paling kuat tercermin dari wawancara penting guru penanggung jawab TIK yang menyatakan:

*"Sebagai guru yang bertanggung jawab di bidang TIK, kebijakan ini meningkatkan beban tanggung jawab saya. Saya harus memastikan kemampuan TIK benar-benar mendukung pencapaian SKL siswa, meskipun fasilitas sekolah masih terbatas."*

Sementara itu, dari sisi kelompok sasaran, wawancara siswa yang paling mewakili kepentingan utama mereka menunjukkan bahwa meskipun siswa menyadari dampak langsung program sekolah, kebutuhan akan sarana dan metode pembelajaran yang lebih mendukung belum sepenuhnya terpenuhi, sebagaimana diungkapkan:

*"Kadang belajarnya masih banyak dengar penjelasan saja. Kalau ada lebih banyak alat belajar atau kegiatan praktik, kami bisa lebih semangat dan lebih paham."*

Ketiga kutipan wawancara tersebut secara langsung memperlihatkan hubungan antara kepentingan aktor yang terdampak (interest affected) dengan temuan sebelumnya, yaitu bahwa implementasi pengembangan SKL sudah sesuai dengan kepentingan utama siswa, guru, dan sekolah, tetapi realisasinya masih dibatasi oleh keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan tuntutan kerja pelaksana.

## **2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan**

Pada indikator jenis dan manfaat yang dihasilkan (*type of benefits*) dalam implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, hasil wawancara menunjukkan bahwa implementasi pengembangan SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas lulusan secara lebih menyeluruh, baik pada aspek akademik, sikap, maupun keterampilan.

Hal ini tercermin dari pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang menegaskan bahwa:

*"harapannya, lulusan kami meningkat kualitasnya, tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga keterampilan dan sikap".*

Manfaat pada aspek keterampilan dan kepercayaan diri siswa juga terlihat dari hasil wawancara guru TIK yang menyatakan bahwa:

*"siswa menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi saat pembelajaran berbasis media digital".*

Dari sisi pembentukan karakter, guru penanggung jawab penguatan nilai kebangsaan dan integritas menyampaikan bahwa:

*"siswa lebih memahami pentingnya disiplin, menghormati guru dan teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas dan aturan sekolah".*

Sementara itu, pada program pencegahan perilaku berisiko, guru penanggung jawab menyatakan bahwa:

*"siswa lebih mengetahui bahaya narkoba, rokok, dan HIV/AIDS serta lebih berani menolak pengaruh negatif".* Namun demikian, manfaat kebijakan tersebut masih dirasakan belum optimal oleh siswa, sebagaimana diungkapkan salah satu siswa kelas IX bahwa:

*"ada manfaatnya karena guru menjelaskan tujuan belajar, tapi pembelajarannya masih lebih sering mendengarkan penjelasan".*

Sehingga menunjukkan bahwa meskipun manfaat kebijakan SKL telah muncul, realisasinya masih terbatas oleh variasi pelaksanaan pembelajaran serta keterbatasan sarana dan sumber daya pendukung.

### 3. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Mengacu pada indikator derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned) dalam model implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, hasil wawancara yang paling penting dan paling merepresentasikan arah perubahan kebijakan di SMP Negeri 49 Pekanbaru adalah pernyataan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Legiani, S.Pd.I., yang menegaskan bahwa perubahan yang diharapkan mencakup target jangka pendek dan jangka panjang, sebagaimana dinyatakan berikut:

*"Dalam jangka pendek, kami berharap siswa mulai memahami dan mencapai kompetensi dasar. Dalam jangka panjang, lulusan kami diharapkan memiliki kemampuan yang lebih komprehensif dan siap bersaing."*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa derajat perubahan yang diinginkan tidak bersifat instan, melainkan bertahap dan berkelanjutan, dengan fokus awal pada ketercapaian kompetensi dasar dalam proses pembelajaran sehari-hari, serta tujuan jangka panjang berupa terbentuknya lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan, dan sikap yang lebih menyeluruh. Arah perubahan tersebut juga dinilai mulai tampak dalam praktik, sebagaimana diungkapkan kembali oleh informan yang sama bahwa:

*"Perubahan sudah mulai terlihat, seperti siswa yang lebih disiplin dan lebih baik dalam mengerjakan tugas, namun pencapaiannya masih bertahap dan belum merata karena keterbatasan fasilitas"*.

Dengan demikian, derajat perubahan yang diharapkan dalam implementasi program pengembangan SKL di sekolah ini tergolong realistis dan kontekstual, sejalan dengan kapasitas sumber daya dan kondisi lingkungan sekolah.

### 4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Mengacu pada indikator letak pengambilan keputusan (site of decision making) dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru berada pada tingkat manajemen sekolah, dengan tetap mengacu pada arahan kebijakan dari Dinas Pendidikan. Pengambilan keputusan dilakukan secara terkoordinasi melalui pimpinan sekolah dan guru, kemudian disosialisasikan kepada pelaksana dan siswa.

Hal ini paling jelas ditunjukkan oleh pernyataan key informan, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, sebagai berikut:

*"Biasanya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, dan tentu saja, arahan dari Dinas Pendidikan. Kami semua berperan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ini."*

Terkait mekanisme perumusan dan penyebaran keputusan, informan juga menegaskan bahwa kebijakan tidak disampaikan secara informal, melainkan melalui forum resmi sekolah, sebagaimana kutipan berikut:

*"Kebijakan dirumuskan melalui rapat koordinasi, lalu disosialisasikan kepada guru melalui pertemuan rutin dan dokumen resmi. Dengan cara ini, semua pihak bisa memahami dan melaksanakan kebijakan dengan baik."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa letak pengambilan keputusan bersifat kolektif di tingkat sekolah, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan dari pemerintah daerah, dengan kepala sekolah sebagai pengambil keputusan utama dan guru sebagai pihak yang terlibat dalam perumusan sekaligus pelaksanaan program.

Sementara itu, dari sudut pandang kelompok sasaran kebijakan, hasil wawancara dengan siswa menunjukkan bahwa aktor pengambil keputusan hanya dikenali pada level sekolah, sedangkan peran pihak di luar sekolah tidak dipahami secara jelas. Salah satu siswa menyampaikan:

*"Kalau yang saya tahu, biasanya yang mengatur itu kepala sekolah sama guru-guru, karena setiap ada program baru pasti yang menyampaikan itu guru di kelas atau waktu upacara. Tapi kalau secara resmi siapa yang benar-benar merancangnya, kami kurang tahu juga. Mungkin ada dari dinas juga, tapi kami taunya dari pihak sekolah saja."*

Siswa lain juga mengungkapkan hal yang serupa, yaitu:

*"Kami tidak pernah dijelaskan secara detail siapa yang membuat kebijakannya. Biasanya hanya diberi tahu bahwa ini program sekolah yang harus dijalankan. Jadi kami menganggap memang sudah keputusan dari sekolah dan kami tinggal mengikuti saja."*

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa secara struktural, pengambilan keputusan SKL berada pada level pimpinan sekolah dan guru dengan dukungan kebijakan dari Dinas Pendidikan, namun secara faktual siswa hanya memandang kepala sekolah dan guru sebagai aktor pembuat kebijakan. Dengan demikian, dalam perspektif teori Merilee S. Grindle, letak pengambilan keputusan pada implementasi SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru cenderung bersifat top-down, di mana kewenangan berada pada aktor struktural sekolah, sementara siswa berada pada posisi sebagai penerima kebijakan dan belum terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

## **5. Pelaksana Program**

Mengacu pada indikator pelaksana program (program implementer) dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru dilaksanakan secara kolektif oleh unsur pimpinan sekolah, guru, dan staf tata usaha, dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, wakil kepala sekolah sebagai koordinator, guru sebagai pelaksana teknis, serta staf tata usaha sebagai pendukung administrasi. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Legiani, S.Pd.I., selaku informan kunci yang menyatakan,

*"Kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, dibantu oleh wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan staf lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program SKL."*

Pada level pelaksanaan program, guru penanggung jawab memegang peran sentral. Ibu Rahmita Zurnia, S.Pd. (penanggung jawab pengembangan TIK) menyampaikan,

*"Saya bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi TIK serta mendampingi guru lain dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran."* Sementara itu, pada program penguatan nilai kebangsaan dan integritas, Ibu Wellya Kurnia Utami, S.Pd. menegaskan,

*"Saya bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan penguatan nilai kebangsaan dan integritas, serta menjadi contoh bagi siswa."* Pada program pencegahan narkoba, alkohol, rokok, dan HIV/AIDS, Bapak Fathul Mubaraq Y, S.Pd. juga menyatakan,

*"Saya bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pencegahan, serta memberikan edukasi dan pembinaan kepada siswa."*

Dari sisi pendukung administrasi, Ibu Leila Putri Lestari, S.Sos. menjelaskan bahwa perannya adalah

*"menyiapkan, mengelola, dan menyimpan dokumen administrasi terkait program SKL, termasuk pendataan siswa dan laporan kegiatan."*

Namun, dari perspektif siswa, peran pelaksana terutama dirasakan melalui keterlibatan langsung guru. Salah satu siswa menyampaikan,

*"Guru-guru biasanya menjelaskan materi sesuai target kelulusan dan membimbing kegiatan pembinaan."* Akan tetapi, pelaksanaan beberapa program belum berjalan optimal, khususnya pada aspek TIK. Seorang siswa mengungkapkan,

*"Untuk TIK memang ada, tapi praktiknya tidak terlalu sering karena fasilitasnya terbatas."*

Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksana program SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru telah berfungsi secara struktural dan operasional sesuai kerangka Grindle, tetapi efektivitas implementasi masih dibatasi oleh keterbatasan fasilitas, sarana pendukung, serta intensitas kegiatan yang belum berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun aktor pelaksana telah menjalankan perannya, penguatan sumber daya dan konsistensi pelaksanaan masih diperlukan agar capaian kebijakan SKL dapat lebih optimal.

## **6. Sumber Daya Yang Dihasilkan Dan Digunakan**

Mengacu pada indikator sumber daya (resources committed) dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa implementasi program pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru telah didukung oleh sumber daya manusia serta sarana prasarana dasar, namun masih dalam kondisi terbatas. Ibu Legiani, S.Pd.I. menegaskan bahwa kekuatan utama sekolah terletak pada komitmen guru, dengan menyatakan,

*"Kami punya tenaga pendidik yang berdedikasi dan fasilitas dasar seperti infokus, sound system, dan smart TV. Kami juga memanfaatkan sumber daya digital dan perangkat pribadi guru."* Meskipun demikian, keterbatasan sarana tetap memengaruhi efektivitas pelaksanaan program, sebagaimana diungkapkan,

*"Keterbatasan ini jelas mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, karena beberapa kegiatan pembelajaran tidak bisa berjalan optimal."* Kondisi serupa juga terlihat pada program pengembangan kompetensi TIK. Ibu Rahmita Zurnia, S.Pd. menyampaikan bahwa sekolah menyediakan infokus, sound system, dan IFP/smart TV secara bergantian, namun

*"kondisi sarana dan prasarana masih terbatas dan belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan program TIK secara optimal."*

Pada program penguatan nilai kebangsaan dan integritas, Ibu Wellya Kurnia Utami, S.Pd. menekankan bahwa sumber daya utama adalah tenaga pendidik dan waktu pembelajaran, tetapi mengakui bahwa

*"sarana dan prasarana masih terbatas."*

Demikian pula pada program pencegahan narkoba, alkohol, rokok, dan HIV/AIDS, Bapak Fathul Mubaraq Y, S.Pd. menyatakan bahwa kegiatan didukung oleh guru, waktu pembelajaran, dan materi sosialisasi, namun

*"keterbatasan dana dan sarana prasarana cukup mempengaruhi."*

Dari sisi administrasi, Ibu Leila Putri Lestari, S.Sos. menjelaskan bahwa pengelolaan SKL didukung oleh tenaga tata usaha dan komputer sederhana, tetapi

*“kendala utamanya adalah keterbatasan fasilitas dan jumlah tenaga tata usaha.”*

Hasil wawancara dengan siswa memperkuat temuan tersebut, di mana fasilitas TIK dinilai tersedia tetapi belum merata dan belum optimal, misalnya

*“di kelas kami kadang pakai infokus, tapi harus gantian,”* serta praktik TIK yang *“tidak sering karena alatnya terbatas.”*

Program penguatan nilai kebangsaan dan integritas maupun pencegahan narkoba juga dirasakan lebih bersifat insidental. Temuan ini menunjukkan bahwa secara administratif sumber daya telah tersedia, tetapi dalam praktik masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan program secara intensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, sejalan dengan kerangka Grindle, keterbatasan sumber daya menjadi salah satu faktor utama yang membatasi efektivitas implementasi kebijakan SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru, meskipun komitmen dan upaya adaptif dari pihak sekolah sudah terlihat kuat.

### **Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)**

#### **1. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat**

Mengacu pada indikator kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor (power, interests, and strategies of actors) dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, implementasi Program Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru menunjukkan bahwa kekuasaan utama berada pada kepala sekolah dan manajemen sekolah, dengan dukungan normatif dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan kewenangan oleh pimpinan sekolah cenderung bersifat persuasif dan partisipatif, sebagaimana disampaikan Ibu Legiani, S.Pd.I.,

*“strateginya lebih mengajak guru berdiskusi, menjelaskan tujuan SKL, dan manfaatnya bagi siswa dan sekolah.”*

Pendekatan kolaboratif ini juga tampak pada pelaksanaan program TIK, di mana Ibu Rahmita Zurnia, S.Pd. menegaskan bahwa

*“kepala sekolah dan manajemen memberikan arahan dan mendorong guru agar tetap menjalankan program sesuai kemampuan sekolah,”*

serta menerapkan strategi *“memaksimalkan fasilitas yang tersedia dan mengatur penggunaan sarana secara bergantian.”* Pada program penguatan nilai kebangsaan dan integritas, Ibu Wellya Kurnia Utami, S.Pd. menyampaikan bahwa pimpinan sekolah memberikan dukungan melalui kebijakan, arahan, dan pengawasan, dengan strategi utama berupa pembiasaan sikap dan integrasi nilai ke dalam pembelajaran sehari-hari. Hal serupa juga terjadi pada program pencegahan narkoba, alkohol, rokok, dan HIV/AIDS, di mana Bapak Fathul Mubaraq Y, S.Pd. menegaskan bahwa dukungan kepala sekolah dilakukan melalui arahan dan pengawasan, serta strategi mengintegrasikan materi pencegahan ke dalam pembelajaran dan kegiatan sekolah.

Dari sisi administratif, Ibu Leila Putri Lestari, S.Sos. menjelaskan bahwa kekuasaan pimpinan sekolah dimanfaatkan untuk pembagian tugas dan penguatan koordinasi, dengan strategi:

*“memperkuat koordinasi antara guru dan tata usaha serta menyederhanakan format administrasi.”* Namun, berdasarkan perspektif siswa, kekuasaan dalam implementasi SKL bersifat top-down, karena siswa hanya menjadi penerima kebijakan, sebagaimana pernyataan *“kami biasanya hanya mengikuti kegiatan yang sudah ditentukan sekolah.”* Siswa juga menilai bahwa beberapa program—khususnya TIK, penguatan nilai kebangsaan dan integritas, serta pencegahan narkoba—belum dirasakan secara optimal karena pelaksanaannya tidak rutin,

jarang disertai praktik, dan lebih banyak terintegrasi dalam kegiatan yang sudah ada. Temuan ini menunjukkan bahwa secara normatif seluruh aktor memiliki kepentingan yang sama, yaitu peningkatan mutu lulusan, namun dalam praktiknya strategi yang dipilih lebih bersifat integratif dan adaptif terhadap keterbatasan sumber daya, sehingga berdampak pada rendahnya intensitas dan visibilitas program. Dengan demikian, dalam kerangka Grindle, belum optimalnya pelaksanaan beberapa program SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru lebih dipengaruhi oleh strategi dan prioritas kepentingan aktor di tingkat sekolah, bukan semata-mata oleh keterbatasan kewenangan.

## **2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa**

Mengacu pada variabel karakteristik lembaga (institutional characteristics) dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, implementasi program SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru dipengaruhi kuat oleh kondisi sekolah yang relatif baru, baik dari sisi kapasitas organisasi, budaya kerja, maupun kesiapan sarana dan sistem manajemen. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kekuatan utama sekolah terletak pada komitmen dan semangat guru serta manajemen. Ibu Legiani, S.Pd.I. menyampaikan bahwa

*“meskipun fasilitas masih terbatas, sekolah justru lebih fleksibel membangun budaya yang sesuai dengan tuntutan SKL.”*

Hal ini menandakan adanya modal sosial yang cukup kuat berupa motivasi, komitmen, dan kemauan untuk berkembang, meskipun belum sepenuhnya ditunjang oleh infrastruktur dan sistem kelembagaan yang mapan. Namun demikian, keterbatasan fasilitas, anggaran, serta pengalaman kelembagaan yang masih berkembang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program, khususnya pada program TIK, penguatan nilai kebangsaan dan integritas, serta pencegahan perilaku berisiko. Ibu Rahmita Zurnia, S.Pd. menegaskan bahwa

*“faktor penghambat utama adalah keterbatasan sarana prasarana dan anggaran sekolah,”* sementara Ibu Wellya Kurnia Utami, S.Pd. menyatakan bahwa

*“pengalaman kelembagaan yang masih berkembang dan keterbatasan fasilitas membuat sekolah harus terus menyesuaikan prosedur dan strategi.”* Meskipun demikian, budaya kerja yang kolaboratif, suportif, dan terbuka terhadap inovasi dinilai membantu keberlangsungan program, sebagaimana diungkapkan bahwa

*“budaya sekolah yang terbuka terhadap inovasi cukup membantu siswa menerima pembelajaran berbasis TIK,”* serta budaya kedisiplinan dan kebersamaan mempermudah internalisasi nilai karakter dan pencegahan. Dari perspektif siswa, kondisi sekolah yang masih baru memang berdampak pada keterbatasan fasilitas, tetapi suasana belajar tetap kondusif karena guru dinilai aktif membina kedisiplinan dan kerja sama. Secara keseluruhan, karakteristik lembaga SMP Negeri 49 Pekanbaru dapat dikategorikan sebagai lembaga yang adaptif dan normatif, yakni mampu menyesuaikan pelaksanaan kebijakan SKL dengan keterbatasan struktural melalui penguatan budaya sekolah dan pembinaan berkelanjutan.

## **3. Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Mengacu pada indikator kepatuhan dan daya tanggap pelaksana dalam teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle, hasil wawancara menunjukkan bahwa kepatuhan guru dalam pelaksanaan Program Pengembangan SKL di SMP Negeri 49 Pekanbaru tergolong baik, meskipun masih memerlukan pembinaan berkelanjutan agar lebih konsisten. Ibu Legiani, S.Pd.I. selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum menegaskan bahwa

*"guru-guru berusaha melaksanakan kebijakan SKL sesuai pedoman, namun tetap perlu pendampingan terutama pada pencatatan administrasi, evaluasi capaian kompetensi, dan penerapan metode pembelajaran."*

Selain itu, sekolah menunjukkan daya tanggap yang cukup tinggi melalui evaluasi rutin dan penyesuaian strategi, sebagaimana disampaikan bahwa

*"setiap kendala, seperti keterlambatan pelaporan atau pembelajaran berbasis TIK, langsung dibahas bersama dan dicarikan solusi agar program tetap selaras dengan tujuan SKL."*

Kepatuhan dan daya tanggap juga tercermin dalam pelaksanaan program-program pendukung. Pada program TIK, Ibu Rahmita Zurnia, S.Pd. menyatakan bahwa

*"siswa cukup antusias dan berusaha mematuhi arahan guru, meskipun masih memerlukan pendampingan karena belum terbiasa menggunakan perangkat dan aplikasi."*

Sekolah menanggapi kendala keterbatasan perangkat dan jadwal dengan evaluasi berkala dan penyesuaian pembagian waktu penggunaan fasilitas. Pada program penguatan nilai kebangsaan dan integritas, Ibu Wellya Kurnia Utami, S.Pd. menjelaskan bahwa

*"siswa cukup disiplin dan aktif, namun masih perlu pembinaan berkelanjutan agar penerapan nilai benar-benar konsisten,"* serta kendala direspons melalui evaluasi rutin dan integrasi nilai ke dalam kegiatan sekolah. Hal yang sama juga terlihat pada program pencegahan narkoba, alkohol, rokok, dan HIV/AIDS, di mana Bapak Fathul Mubaraq Y, S.Pd. menegaskan bahwa

*"siswa menunjukkan partisipasi yang baik, tetapi tetap membutuhkan pengawasan agar perilaku hidup sehat dapat diterapkan secara konsisten,"* dan sekolah merespons keterbatasan fasilitas serta waktu melalui penyesuaian metode dan jadwal kegiatan.

Dari sisi administrasi, Ibu Leila Putri Lestari, S.Sos. menyampaikan bahwa

*"kepatuhan terhadap prosedur administrasi sudah cukup baik, namun masih perlu penguatan agar seluruh dokumen selalu tepat waktu,"* serta setiap kendala administratif ditangani dengan penyederhanaan alur dan penguatan koordinasi. Sementara itu, hasil wawancara siswa menunjukkan bahwa mereka umumnya patuh mengikuti kegiatan dan aturan sekolah, *"kalau ada kegiatan biasanya kami ikut sesuai arahan guru,"* namun kepatuhan tersebut masih sangat dipengaruhi oleh pengawasan, *"lebih patuh kalau gurunya mengawasi,"* serta keterbatasan kemampuan teknis, khususnya pada pembelajaran TIK. Siswa juga mengakui bahwa pemahaman nilai karakter masih berada pada tahap pembiasaan, *"kadang masih lupa atau ikut-ikutan teman."* Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan guru dan daya tanggap sekolah tergolong baik dan adaptif, sedangkan kepatuhan siswa masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terinternalisasi, sehingga dalam kerangka Grindle, penguatan pembinaan, pendampingan, dan strategi pembelajaran yang lebih partisipatif menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Pengembangan SKL.

## **Kesimpulan**

Implementasi program pengembangan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMP Negeri 49 Pekanbaru pada prinsipnya telah berjalan sesuai kebijakan dan mengacu pada perencanaan sekolah, namun pelaksanaannya belum optimal dan masih cenderung bersifat formalitas, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kompetensi lulusan belum nyata dan berkelanjutan. Berbagai program seperti penguatan karakter, literasi, pembelajaran berbasis proyek, ekstrakurikuler, dan penguatan Profil Pelajar Pancasila telah dilaksanakan, tetapi sebagian masih minim penguatan teknis, terutama pada pengembangan TIK, nilai kebangsaan dan integritas, serta pencegahan perilaku berisiko. Ditinjau berdasarkan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, isi kebijakan pada dasarnya telah dipahami oleh pelaksana,

namun derajat perubahan yang diharapkan belum tercapai akibat keterbatasan sumber daya, waktu, kompetensi pendukung, beban kerja guru, serta koordinasi yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan agar program SKL benar-benar berfungsi meningkatkan capaian kompetensi lulusan secara nyata.

### Daftar Pustaka

- 1, P. P. P. R. I. N. 32 T. 2013 T. P. A. P. P. N. 19 T. 2005 T. S. N. P. P. 1 R. I. N. 32 T. 2013 T. P. A. P. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1. *Sekretariat Negara*, 2(32), 148–164.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Amane, A. P. O., Syaickhu, A., Kristinae, V., Munizu, M., Fatkhuri, Rofi'ah, H., Purba, P. M., Andhayani, A., Hendrayady, A., Fajrin, Y., Zulaekah, & Barlian, A. (2023). Manajemen Sektor Publik. In *Manajemen Sektor Publik* (Issue July).
- Andy Fefta Wijaya, O. R. D. (2014). *Manajemen Publik Teori Dan Praktik*. [https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen\\_Publik/Oj9qdwaqbaj?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Publik/Oj9qdwaqbaj?hl=id&gbpv=0).
- Anirwan. (2025). *Konsep Teori Administrasi Publik Dan Implementasi Kebijakan*. [https://www.google.co.id/books/edition/Konsep\\_Teori\\_Administrasi\\_Publik\\_Dan\\_Imp/T5f-Eqaaqbaj?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Konsep_Teori_Administrasi_Publik_Dan_Imp/T5f-Eqaaqbaj?hl=id&gbpv=0).
- H. Aras Solong, A. Y. (N.D.). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. 2021.
- Heryana, A. (2018). Pengertian Informasi 1. *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 14. Eprints.Polsri.Ac.Id.
- Imronah. (2020). Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, Dan Kriteria Pengukurannya. *Gema Eksos*, 5(1), 65–85.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87.
- Nasional, U.-U. R. I. N. 20 T. 2003 T. S. P. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1–57.
- Pemerintah, P. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021tentang Standar Nasional Pendidikan*. 102501.
- Pendidikan, N. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemezuntah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016. (2016). *Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016*.
- Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan. (2025). *Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Standar Kompetensi Lulusan*. *Kemdikdasmen*, 1–12.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Suryani, I., Bakiyah, H., & Isnaeni, M. (2020). Strategi Public Relations Pt Honda Megatama Kapuk Dalam Customer Relations. *Journal Komunikasi*, 11(2), 101–110. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/index>.
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation Of Educational Policies. *وتعليمها الطبيعية العلوم مجال في البحوث مجلة*, 1(1), 41–53.